



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok
Email: panwaslubukittinggi@gmail.com
Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 019/PM. 00.02/K.SB-13/01/2023 Bukittinggi, 14 Januari 2023
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan.**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di

Tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan sedang berlangsungnya pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Bukittinggi yang tahapannya akan memasuki tahapan seleksi wawancara terhadap para calon pada tanggal 15-17 Januari 2023, maka merujuk Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU nomor 534 tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota yang menjelaskan bahwa di antara poin materi seleksi wawancara adalah persoalan integritas, independensi, dan profesionalitas calon. Kemudian melihat rekam jejak para calon untuk menilai keterpenuhan syarat calon yang diwawancarai.

Berkenaan dengan hal di atas, demi terwujudnya pemilu yang berintegritas dengan calon-calon penyelenggara pemilu yang juga berintegritas serta mengantisipasi persoalan-persoalan yang mungkin terjadi pasca tahapan rekrutmen, kami menghimbau dan mengingatkan KPU Kota Bukittinggi untuk:

1. Sangat selektif terhadap calon anggota PPS yang diduga tidak independen atau punya rekam jejak terlibat keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu atau menjadi anggota partai politik.
2. Agar dalam melaksanakan proses rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) tetap mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,

RUZI HARYADI, S.Ag.MA.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip.